

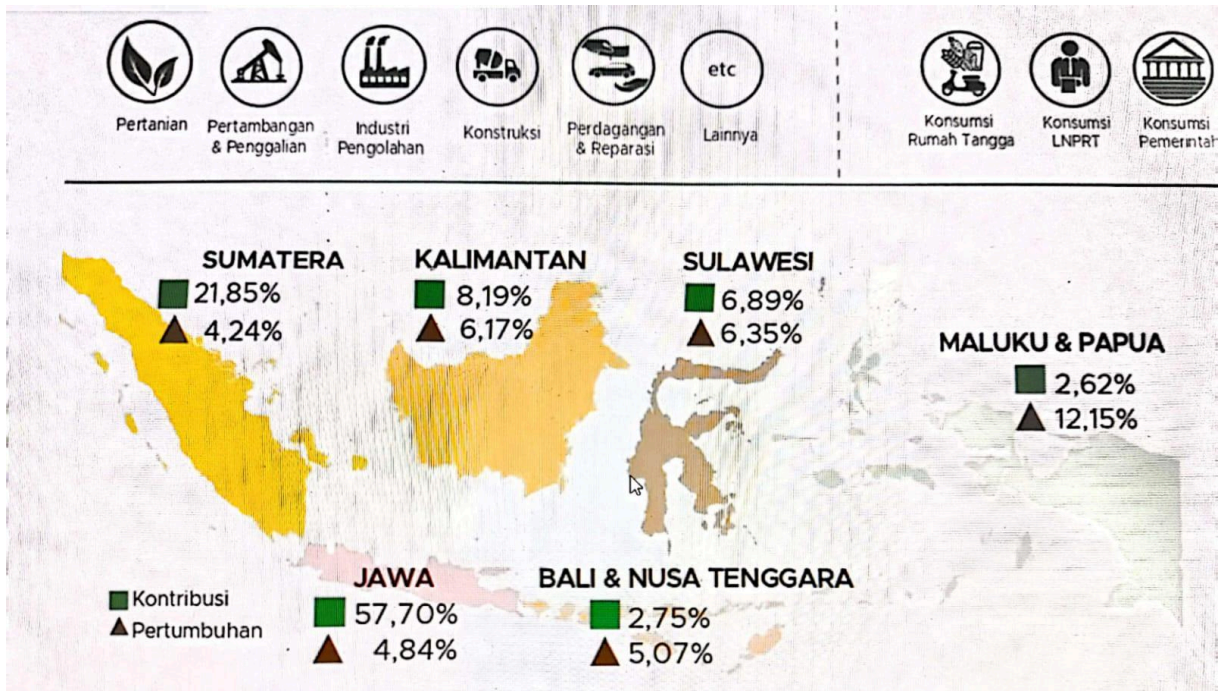
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN IKN TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK KALIMANTAN TIMUR

Dexter XII IPS 3/13 & Osvaldo XII IPS 3/28

Pemerintah Indonesia era Jokowi Widodo memulai program pembangunan ibu kota baru yang dinamai dengan Ibu Kota Nusantara atau biasa disingkat IKN pada tahun 2022. Program ini memindahkan ibu Kota Indonesia yang sebelumnya berada di pulau Jawa menjadi di pulau Kalimantan. Pemerintah memilih wilayah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur dengan beberapa alasan yang diungkapkan. Berdasarkan berita Kementerian Sekretariat Negara, 22 Februari 2023, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Februari 2023. mengungkapkan tujuan utama dari pembangunan IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Beliau melihat bahwa Pendapatan Domestik Bruto Indonesia hanya didominasi oleh pulau Jawa sebanyak 58 persen yang dianggapnya bukti pembangunan Indonesia terlalu Jawa sentris yang seharusnya adalah Indonesiasentris. Dengan adanya pembangunan IKN, diharapkan menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia yang belum merata sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk Kalimantan Timur.

Salah satu cara untuk menilai perekonomian suatu negara sudah merata atau belum adalah dengan melihat sumber Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara. PDB negara didapatkan dari akumulasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap wilayah yang dimiliki negara tersebut. PDB dan PDRB merupakan kemampuan menghasilkan produk dan jasa yang dimiliki lokasi tertentu. Perbedaan keduanya berada pada cakupan wilayah, jika PDB berada pada cakupan satu negara, sedangkan PDRB berada pada cakupan daerah. Oleh karena itu, menurut pernyataan pemenang nobel ekonomi, Amartya Sen, pengukuran ketimpangan ekonomi dilakukan dengan melihat sumber PDB negara tersebut. Hal ini dikarenakan PDB suatu negara mencerminkan bagaimana setiap daerahnya memproduksi barang dan jasa. PDB yang berasal dari PDRB satu daerah dominan saja menunjukkan perekonomian negara hanya dipengaruhi oleh daerah itu saja, sehingga sebagian besar keuntungan ekonomi hanya dirasakan oleh daerah tersebut. Sementara wilayah lain yang memiliki angka PDRB kecil maka tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang setara. Jadi, PDB yang terpusat di satu daerah menandakan adanya ketimpangan ekonomi antara daerah

yang lebih berkembang dan yang lebih tertinggal. Oleh karena itu, ekonomi negara yang baik adalah memiliki PDRB yang merata di seluruh wilayahnya sebagai sumber PDB negara.



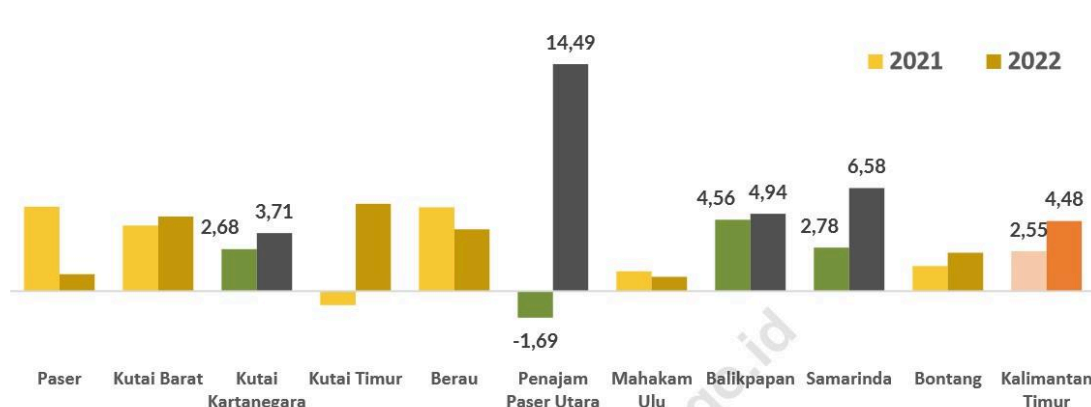
Data Distribusi PDRB wilayah Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat 2024, pertumbuhan PDB Indonesia masih sangat dominan dari PDRB pulau Jawa yang jumlahnya 57,40%. Hal ini menunjukkan dominasi pulau Jawa dalam kegiatan ekonomi nasional seperti Industri, jasa, dan perdagangan di Pulau Jawa jauh lebih berkembang dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Fakta ini bisa terjadi karena di pulau Jawa ada kota-kota besar di Indonesia yang ramai akan kegiatan ekonomi, seperti Kota Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jabodetabek. Sayangnya, jika kita bandingkan dengan pulau lain, kita hanya mengenal beberapa kota besar saja yang menjadi pusat perekonomian masyarakat, seperti Kalimantan yang hanya memiliki Balikpapan sebagai kota yang cukup terkenal di Indonesia.

Kondisi ini tentunya menjadi bukti nyata ekonomi Indonesia yang masih buruk dan mengalami ketimpangan. Sesuai dengan pernyataan Amartya Sen, jika PDB yang dominan di satu tempat, menandakan wilayah lain mengalami kesenjangan dan belum mengalami kondisi sebaik tempat penghasil PDB terbesar di negara tersebut. Adanya kesenjangan ekonomi akan berpengaruh ke berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya mengacu kepada kesejahteraan masyarakat sendiri. Jika ekonomi suatu daerah tidak baik, masyarakat akan kesulitan mendapatkan pendidikan dan otomatis kualitas kesehatan masyarakat menurun

akibat kurangnya edukasi mengenai ilmu pengetahuan seperti kesehatan. Buruknya pendidikan dan kesehatan akhirnya menurunkan kualitas pekerja dalam lapangan kegiatan perekonomian dan perekonomian wilayah tidak bisa berkembang. Pada akhirnya, siklus kematian ini terus terjadi tanpa henti. Kondisi ini tidak akan bisa terus dibiarkan karena sudah tidak sesuai dengan kehidupan bernegara yang ideal berdasarkan dasar negara Indonesia sendiri. Salah satu dasar Indonesia yaitu sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Melalui sila ini, negara harus menjamin keadilan bagi rakyatnya tanpa terkecuali. Jika saat ini masih terjadi ketimpangan yang sangat besar dari 1 wilayah dengan wilayah yang lain, maka pelaksanaan dari sila kelima ini sendiri menjadi pertanyaan bagi kita semua.

Untungnya pemerintah Indonesia di era Jokowi Widodo mengeluarkan sebuah kebijakan positif yang mampu mengubah perekonomian Indonesia yang tidak merata ini. Sebagaimana dinyatakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi, “Memprioritaskan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta membangun infrastruktur di daerah yang masih tertinggal”. Undang-undang ini berhasil dilaksanakan pemerintahan Jokowi Widodo sebagai gerakan memperbaiki perekonomian Indonesia dengan mendirikan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Adanya perpindahan ibu kota, maka akan mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pulau Jawa sekaligus meningkatkan laju PDRB pulau Kalimantan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Gambar 1. 8 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur (%), 2021-2022

Tujuan IKN pun berhasil dalam menumbuhkan PDRB Kalimantan Timur dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022. Wilayah Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan, seperti wilayah Penajam Paser Utara yang mengalami pertumbuhan sebanyak 14,49% dari yang sebelumnya minus, yang kemudian disusul dengan daerah Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pembangunan infrastruktur IKN menciptakan berbagai lapangan kerja, terutama di sektor konstruksi, transportasi, dan layanan, yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, memudahkan masyarakat untuk berbisnis dan mengakses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang nantinya meningkatkan kualitas pekerja dalam melakukan kegiatan perekonomian dan ekonomi Kalimantan bisa berkembang. Keberhasilan program IKN dibuktikan melalui data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Provinsi Kalimantan Timur pada Agustus 2023 meningkat menjadi 1.950.860 orang, naik 98.058 orang setelah dimulai program IKN pada Januari tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan penduduk setempat. Dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aksesibilitas melalui infrastruktur yang lebih baik, IKN merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan otomatis meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur, memungkinkan mereka untuk mengakses layanan penting dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Pada akhirnya, langkah pembangunan IKN menjadi langkah awal dalam melahirkan ekonomi Indonesia yang Indonesiasentris dengan mengembangkan pulau Kalimantan.